

BAB 1

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2020 sudah menggunakan aplikasi perencanaan sejak musrenbang hingga usulan renja dan proses disetujui lewat rkpd, hubungan antara entry data dengan TAPD selalu upto date lewat komunikasi angka di RKPD 2020 dengan angka di RENJA 2020. Usulan penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi.

Mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, dengan menganalisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sehingga maksud dan tujuan tercapai sesuai dengan sasaran.

Perumusan Tujuan dan Sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja Perangkat Daerah tahun lalu, sehubungan berpedoman Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

b. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Tahun 2020 pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Pekalongan adalah :

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2020
2. Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, RKPD Tahun 2018 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala

Daerah menjadi landasan penyusunan KUA PPAS untuk menyusun APBD Tahun 2020.

3. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 4 tahun 2016 tentang RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021;
4. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan dan Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kominfo Kota Pekalongan yang pemberlakuaanya mulai tanggal 31 Oktober 2018.

C. Maksud dan Tujuan

Renja Perangkat Daerah yang didasarkan pada penalaahan rancangan Rencana Kerja Dinas Kominfo Kota Pekalongan Tahun 2020 yang rumusan program/kegiatan di dalam renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan Urusan Pelayanan Pilihan Komunikasi dan Informatika yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kominfo Kota Pekalongan Tahun 2020 ini disusun dengan tujuan untuk menjaga konsistensi Rencana Pembangunan Daerah dengan anggaran pembangunan daerah yang selanjutnya akan dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2020.

D. Sistematika Penulisan

Secara sistematis RENJA pada Dinas Komunikasi dan Informatika disusun sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- a) Latar Belakang
- b) Landasan Hukum
- c) Maksud dan Tujuan
- d) Sistematika Penulisan

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- a) Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah (Tabel T-VI.C.6)
- b) Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-VI.C.1)
- c) Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- d) Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Tabel T-VI.C.9)

BAB III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan memuat :

- a) Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- b) Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- c) Program dan Kegiatan (Tabel T-VI.C.10)

BAB IV Penutup.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN

RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksana Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstranya.

Pada **Tabel T-VI. C.6.**

Rencana Kerja Dinas Kominfo Kota Pekalongan merupakan awal atas perubahan RPJMD Tahun 2016-2021, di Tahun 2018 sesuai dengan Perubahan RPJMD 2016 – 2021 Dinas Kominfo mengalami penambahan urusan dari sebelumnya hanya urusan Komunikasi dan Informatika bertambah urusan Statistik dan urusan Persandian. Oleh karena itu indikator yang terpasang dalam Indikator Kinerja Utama Dinas Kominfo semula ada 11 indikator diringkas menjadi 4 indikator sasaran, yang tidak mengurangi kinerja bahkan menfokuskan kinerja secara cascading yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD 2016-2021. Dalam Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu Dinas Kominfo telah mencapai 89,14% dalam Belanja Langsung dari 54 Kegiatan.

Sesuai Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 Dinas Kominfo mempunyai 2 indikator Kinerja Utama, diantaranya :

1. Nilai keterbukaan informasi publik Kota Pekalongan
2. Cakupan kelompok masyarakat yang mampu memanfaatkan teknologi informasi.

Sedangkan urusan Dinas Kominfo mempunyai 3 urusan terkait program dan kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

A. Urusan Komunikasi dan Informatika, meliputi 4 sarana, yakni :

A.1. Sekretaris, sasaran indikatornya adalah Nilai Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tingkat Kematangan Impelementasi SPIP, hal ini meliputi 4 program, dengan rincian penjelasan :

A.1.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdapat 10 kegiatan, dengan indikator program :

Persentase pelaksanaan surat-menyurat, sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat koordinasi dan konsultasi sudah tercukupi 12 bulan

A.1.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana terdapat 4 kegiatan

Indikator Program :

Persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga.

A.1.3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Indikator Program :

Persentase ketersediaan Capaian Laporan Kinerja berupa dokumen Renja, RKA (Penetapan dan Perubahan), DPA, SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJIP), LPPD, LKPJ, dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD bulanan

A.1.4. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat, terdapat 2 kegiatan :

Indikator Program :

Prosentase kehadiran aparatur.

B.1. Bidang PengelolaanInfrastruktur Informatika dan Statistik Daerah (disingkat Bidang PIISDA) mempunyai 1 sasaran dengan indikatornya adalah Jumlah penyelenggaraan capacity building bidang TIK bagi kelompok-kelompok masyarakat dan stakeholder, hal ini meliputi 2 program, dengan rincian penjelasan :

B.1.1. Program Pengembangan Infrastruktur TIK, meliputi 3 Indikator Program :

- a) Persentase OPD, Kelurahan dan Kecamatan dalam layanan infrastruktur dan JaringanTIK/ Fiber Optik (FO)
- b) Persentase Cakupan dalam layanan infrastruktur dan JaringanTIK/ Fiber Optik (FO) Klaster Kesehatan (Puskesmas, RS, Pustu dll)
- c) Persentase Cakupan layanan infrastruktur dan JaringanTIK/ Fiber Optik (FO) Klaster Pendidikan (Sekolah negeri, smp, sd, tk)

B.1.2. Program Program Pengembangan Data/ Informasi / Statitik Daerah, meliputi 3 Indikator Program, yakni :

- a) Persentase Data Statistik Sektoral Yang Tercakup dalam Publikasi Data

Statistik Tahunan

- b) Prosentase produsen data (OPD) yang berkontribusi dalam sistem satu data
- c) Persentase OPD yang melakukan pengumpulan dan publikasi data sektoral (Profil OPD)

C.1. Bidang Pengelolaan Sistem Informasi dan Persandian (disingkat PSIP) mempunyai 1 sasaran yang sama dengan Bidang PIISDA dengan indikatornya adalah Jumlah penyelenggaraan capacity building bidang TIK bagi kelompok-kelompok masyarakat dan stakeholder, hal ini meliputi 2 program, dengan rincian penjelasan :

C.1.1. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, meliputi 3 Indikator Program, yakni :

- a) Persentase OPD yang menjalankan layanannya dengan menggunakan Aplikasi/ Sistem Informasi .
- b) Persentase kelompok masyarakat mendapatkan capacity building TIK untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi.

C.1.2. Program Penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi, meliputi 3 Indikator Program, yakni :

- a) Persentase berita daerah yang lancar aman dan terjaga kerahasiannya.

D.1. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi (disingkat Bidang PIKP), sasaran indikatornya adalah Persentase OPD menerapkan KIP dengan Kategori “Cukup Informatif/Baik” dan Prosentase OPD dengan IKM “Baik”, hal ini meliputi 2 program, dengan rincian penjelasan :

D.1.1. Program Pengelolaan Desiminasi Informasi, Kerjasama Media dan Media Penguatan Sumber Informasi Publik, meliputi 2 Indikator Program,yakni :

- a) PerPersentase OPD / Urusan Pemerintahan/ Sektor Pembangunan yang tercakup dalam layanan Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik
- b) Persentase Kelurahan yang memiliki / mengembangkan Sumber Daya Komunikasi Publik Sebagai Jejaring Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik.

D.1.2. Program Pengelolaan Pengelolaan Pengaduand an Aspirasi Masyarakat, dan penguatan KIP, meliputi 2 Indikator Program,yakni :

- a) Persentase OPD Menerapkan KIP dengan Kategori "Cukup Informatid/ Baik".
- b) Persentase OPD yang melakukan Pengelolaan Pengaduan / Aspirasi Masyarakat .

B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-VI.C1)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2018 Kota Pekalongan berdasarkan perumusan terdapat 10 indikator kinerja yang dicapai sebagai berikut :

B.1. Nilai ketrbukaan informasi Publik Kota Pekalongan dengan target capaian Nilai=70 dan tercapai 86.2 dengan didukung konten web berisikan ppid.pekalongankota.go.id didalamnya terdapat Daftar Informasi Publik yang semua OPD bisa mengirim standart informasi yang di publikasi secara online.

B.2. Cakupan kelompok masyarakat yang mampu memanfaatkan teknologi informasi dengan target Kelompok=15 karena masih proses pelaksanaan sehingga yang dilaporkan baru tercapai 21 kelompok, diantaranya :

1. 1. Himpaudi
2. 2. Ikatan Wanita Pengusaha Muslim
3. 3. Ikatan Wanita Digital Indonesia (IWODI)
4. 4. Arah (Assosiasi Rakyat Anti Hoax)
5. 5. Relawan TIK
6. 6. Open Source Software
7. 7. Dewan TIK
8. 8. MGMP TIK
9. 9. Animator
10. 10. Blogger
11. 11. Fotografer
12. 12. Film
13. 13. Catur Pilar
14. 14. RW Net
15. 15. BKR
16. 16. PKK
17. 17. Karangtaruna
18. 18. Lppar
19. 19. Pecinta Domain
20. 20. Formaci (Forum Masyarakat Anti Hoax Cinta NKRI)
21. 21. RAPI

C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu penting urusan Komunikasi dan Informatika mencakup pembinaan, pelayanan, pengelolaan, pemanfaatan dan pengendalian sesuai kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan :

a. Isu tentang Perkembangan fisik Gedung RKB

Gedung RKB sudah diusulkan untuk rehab bangun gedung dan anggaran sebesar Rp. 150.000.000 sehingga tidak mencukupi dalam perbaikan gedung ternyata setelah dilaksanakan gedung sangat rapuh dan kayu diatas nya juga sudah rapuh sehingga biaya tahun 2019 untuk pavingisasi dan pagar sekaligus DED untuk tahun depan diupayakan untuk pembangunan gedung dengan DED sebesar 850juta

b. Isu tentang Perkembangan Batik TV.

Perkembangan Batik TV selain transmitter sudah dipenuhi terdapat peralatan yang sudah mulai berkurang diamankan usia sehingga perlu penambahan peralatan seiring dengan transmitter yang menambah frekuensi. Diusulkan tahun 2020 Belanja modal untuk memperbaharui peralatan.

c. Isu tentang Operasionalisasi Call Center 112

Setelah terbangunnya sarana gedung oleh Bagian Rumah Tangga Setda, maka perlu difungsikan dalam pengisian ruang CC 112 sebagai (pusat pengaduan kedaruratan). Adapun aplikasi Call Center 112 merupakan gabungan dari Call Centetr 110 (Polisi), 113 (Damkar), 118 (Ambulan), 119 (Kesehatan), 115 (Basarnas). sehingga butuh biaya operasional yang tinggi karena layanan CC 112 selama 24 jam on. Adapun kebutuhan untuk sarana peralatan CC 112 dan Software aplikasi sebagai distribusi penerima kedaruratan dan dari pengadu yang tidak kena biaya. Kebutuhan itu sudah disampaikan proposalnya oleh PT. Telkom.

d. Isu tentang SPBE

Tahun 2019 Dinas Kominfo telah mengikuti evaluasi SPBE tingkat nasional dengan capaian nilai 3.14 dengan kategori BAIK. Hal ini menjadikan tantangan untuk mendapatkan nilai yang lebih tinggi.

e. Keamanan Informasi

Dinas Kominfo Tahun 2020 menambah pagu pada kegiatan Pengembangan Sistem Keamanan Informasi sebesar Rp. 200.000.000,- guna menyusun ISO singkatan dari The International Organization for Standardization, penulisannya bakunya adalah ISO. (SIM/ISO/IEC/27001) Tehnical Framework). Sehubungan dengan itu Penyusunan Kajian Kerangka Tehnis Perencanaan Integrasi Aplikasi Kota Pekalongan (e-Goverment Aplication Integrastion Technical Framework).

D. Penelaahan Usulan program dan kegiatan Masyarakat (Tabel T.VI. C9)

Dinas Kominfo Kota Pekalongan sampai dengan akhir tahun 2019 telah melaksanakan seluruh program/kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya dengan capaian realisasi 86,2% dari 54 kegiatan. Adapun pemangku kepentingan dalam pencapaian kinerja yang diuraikan dalam sasaran strategis dan hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut :

D.1. Kegiatan yang bergeser antar program dari Tahun 2019 ke Tahun 2020 karena tidak sesuai dengan indikator sasaran, diantaranya :

1. Program Pengembangan Infrastruktur TIK

Kegiatan yang bergeser ke program lain:

- Fasilitasi Pembangunan Pekalongan Smartcity (– PINDAH PROGRAM 23.029)

D.2. Kegiatan yang hilang ditahun berikutnya (tahun 2017 ada namun tahun 2018 tidak ada) adalah :

1. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi (23.00)
2. Penyediaan informasi kedianasan dihilangkan (23.008)
3. Fasilitasi layanan SIM Rujukan Terpadu (23.020)
4. Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (23.026)
5. Pengelolaan aplikasi SIMPATIKK (23.030)
6. Fasilitasi pengembangan dan pengelolaan SIM perencanaan pembangunan daerah (23.034)

D.3. Kegiatan baru (di tahun 2020 tidak ada namun tahun 2019 ada) adalah :

1. Kerjasama Informasi dan Mass Media

D.4. Usulan Kegiatan yang dalam (RENJA) 2020 yang tidak sesuai dengan RKPD, sebagai berikut:

1. . Usulan yang menjadi Prioritas 2 (P2)

- Kegiatan : Pembangunan gedung kantor diusulkan 850.000.000,-

2. Usulan yang menjadi Prioritas 1 (P1) tetapi kurang dan lebih dari plafon usulan anggaran

Hampir kesemua kegiatan berubah angkanya dikarenakan disesuaikan dengan ASB (Analaisis Beban Biaya). Sehingga detail kenaikan dan pengurangan sangat diperhitungkan apalagi kegiatan yang semula ada dan nama kegiatan spesifik dihilangkan seperti di Program Optimalisasi Pemanfaatan TIK.

BAB III

TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PEKALONGAN

A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

program prioritas dalam rangka pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota periode 2016-2021, yang merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (dedicated) Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana. Program tersebut harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah.

Adapun tujuan sasaran Program dan Kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai Renstra Tahun 2017 – 2021 sebagai berikut :

1	Tujuan	Meningkatkan kemampuan komunitas dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai salatu upaya Pemberdayaam	Persentase teknologi informasi yang dikembangkan dan dimanfaatkan oleh komunitas
1.1	Sasaran	Meningkatnya kemampuan Komunitas dalam pemanfaatan Teknologi Infomrasi Berbasis Komunitas	Cakupan Komunitas yang berdaya dalam memanfaatkan Teknologi Informasi
1.1.1	Program	Program Pemanfaatan teknologi informasi	1 : Persentase OPD yang menjalankan layanannya dengan menggunakan Aplikasi/ Sistem Informasi .
			2 : Persentase kelompok masyarakat mendapatkan capacity building TIK untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi.
2.1.	Sasaran	Meningkatnya kualitas layanan	Persentase OPD dengan Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kategori

		publik	Baik (Informatif)
2.1.1	Program	Program Pengelolaan Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat dan Penguatan KIP	Persentase OPD Menerapkan KIP dengan Kategori "Cukup Informatid/ Baik".
			2 : Persentase OPD yang melakukan Pengelolaan Pengaduan / Aspirasi Masyarakat.

B. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dengan membandingkan antara pencapaian target dengan realisasi yang ada. Berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan dapat diketahui bahwa OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan dari 4 Indikator sasaran rincian capaian seluruh sasaran sebagai berikut :

No	Indikator Sasaran	Target	Nilai Cap. Kinerja s/d Juni	Keterangan
1.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	50	93.33	Target : 31 Baik : 29 Tercapai : 29/31
2.	Nilai AKIP	83%	NA	Belum tercapai
3.	Persentase peningkatan jumlah pengguna aplikasi berbasis komunitas	66.67%		tercapai
4.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	50	93.33	Tercapai
5.	2 : Persentase OPD yang melakukan Pengelolaan Pengaduan / Aspirasi Masyarakat.	100	100	Tercapai

C. Program dan Kegiatan (pada Tabel T-VI.C.10)

Didalam rumusan rencana program kegiatan bagi OPD tahun 2020 dan prakiraan maju 2020 Sebagai bahan evaluasi terdapat target (sesuai jenis sasaran dengan target indikator yang ingin dicapai), dimasing-masing kegiatan terdapat keluaran dan Hasil. Adapun kegiatan yang mengalami kenaikan dari tahun 2019 ke 2020 dikarenakan

kenaikan tarif tahunan dan standarisasi, selain itu juga kenaikan atau penurunan yang membulatkan tidak dicantumkan hanya yang naik signifikan, diantaranya sebagai berikut :

1. Program administrasi perkantoran dengan anggaran menurun pada kegiatan :
 - semula th 2019 pagu Rp. 1.113.890.000 dan usulan Renja Th 2020 sebesar Rp. 1.039.640.000,-
2. Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
 - semula th 2019 pagu Rp. 631.620.000 dan th 2020 sebesar Rp. 475.589.999,-
3. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. (Naik tidak signifikan menyesuaikan pagu Kota)
 - semula th 2019 pagu Rp. 48.000.000 dan th 2020 sebesar Rp. 46.000.000,-
4. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat
 - semula th 2019 pagu Rp. 39.907.000 dan th 2020 sebesar Rp. 46.640.000,-
5. Program Pengembangan Infrastruktur TIK 1
 - semula th 2019 pagu Rp. 1.891.600.000 dan th 2020 sebesar Rp. 1.559.400.000,-
6. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
 - semula th 2019 pagu Rp. 1.504.500.000 dan th 2020 sebesar Rp. 1.387.055..000,-
7. Program pengeloan desiminasi informasi kerjasama media dan penguatan sumber daya komunikasi publikasi
 - semula th 2019 pagu Rp. 3.399.525.000 dan th 2020 sebesar Rp. 3.341.000..000,-
8. Program Pengelolaan Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat dan Penguatan KIP.
 - semula th 2019 pagu Rp. 678.000.000 dan th 2020 sebesar Rp. 723.428..000,-
9. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
 - semula th 2019 pagu Rp. 270.000.000 dan th 2020 sebesar Rp. 171.125..000,-
10. Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintahan
 - semula th 2019 pagu Rp. 324.000.000 dan th 2020 sebesar Rp. 91.425..000,-

BAB IV

PENUTUP

Laporan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 merupakan hasil evaluasi pelaksanaan kinerja, sebagai bahan rencana yang berkelanjutan dan terarah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan menyusun Laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban Tahun 2019.

Adapun pencapaian dari beberapa kebijakan dibidang Komunikasi dan Informatika tersusun beberapa program dan ditindaklanjuti beberapa kegiatan sehingga Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kominfo Kota Pekalongan Tahun 2019 dapat terselesaikan. Usulan program dan kegiatan yang disampaikan dalam Rencana Kerja Dinas Kominfo Kota Pekalongan Tahun 2020 ini telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfo Kota Pekalongan secara cascading berurutan dari Eselon IV (Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian) melaksanakan kegiatan sesuai dengan keluaran dan Eselon III mengemban program yang merupakan rekapitulasi kegiatan dengan indikator program dan Eselon II (Kepala Dinas) yang mempunyai sasaran dengan indikator dari Sekretaris/Bidang menuju tujuan dan terarah dalam misi dan mensukseskan visi Kota Pekalongan, tertuang dalam Perubahan RPJMD 2016-2021.

Demikian Laporan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan ini disusun, dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, Terima kasih.

Pekalongan, 31 Agustus 2019
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Pekalongan



Dra. Agus Marhaendayana MM
196508141992031005

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas Rahmat, Hidayah dan Inayah-Nya sehingga Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun 2020 dapat terselesaikan.

Usulan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2020 ini merupakan penyusunan yang telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan dan menyangkut keberhasilan dan pencapaian target yang telah dituangkan dalam Perda Nomor 4 Tahun 2016 RPJMD Kota PEKalongan Tahun 2016 – 2021.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2020 ini, kami sampaikan terima kasih.

Selanjutnya dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2020 ini, harapan kami apa yang dituangkan dalam Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun 2020 dapat terealisasi dan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan untuk Tahun 2020.

Pekalongan, 03 September 2019
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Pekalongan



Marhaendayana MM
196508141992031005

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	1
a. Latar Berlakang	1
b. Landasan Hukum	1
c. Maksud dan Tujuan	1
d. Sistematika Penulisan	2
 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH	 3
1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra	3
2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	4
3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	5
4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	5
5. Dasar Usulan Awal Renja	6
 BAB III. Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan Dinas Kominfo	 7
A. Telaahan terhadap kebijakan Nasional	7
B. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	10
C. Program dan Kegiatan	11
 BAB IV. PENUTUP	 12

DAFTAR LAMPIRAN

halaman

a. Lampiran I Tabel T.VI.C6	13
Evaluasi Pelaksana Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Tahun 2017	
b. Lampiran II Tabel T.VI.C1	
Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	14
c. Lampiran III Tabel T.VI.C10	
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 Prakiraan Maju Tahun 2018	15
d. Lampiran IV Tabel T.VI.C.9	
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2018	16

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2020**

**DINAS KOMINFO RENCANA KERJA

TAHUN 2020**

**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2019**